

PENGEMBANGAN PARIWISATA INKLUSIF BERBASIS COMMUNITY BASED TOURISM DALAM PROGRAM CIPTA KERJA DAN EKONOMI KREATIF PADA KOMUNITAS PERSATUAN PENYANDANG DISABILITAS SUMENEP

Merlia Indah Prastiwi¹, Yuliana Windi Sari², Ekna Satriyati³, Setyaningsih⁴

^{1,2,3,4}Prodi Sosiologi Universitas Trunojoyo Madura

Email: merlia.prastiwi@trunojoyo.ac.id

Abstract

In carrying out sustainable development, it is necessary to pay attention to many aspects. The aspect of justice for the entire community is one of the characteristics of religious tourism branding which is able to provide access to the entire community to feel comfortable, safe when traveling and create significant growth in the creative economy of the surrounding community. Madura is generally known as a religious area that emphasizes religious values. In religious values, God never differentiates between his people. In its development, Madura religious tourism should not only pay attention to economic aspects, but also pay attention to the involvement of social justice in providing opportunities for people with disabilities to access the religious facilities and religious tourism they have. Together with the tourism department, researchers are trying to provide suggestions and strategies for the sustainability of religious tourism development that prioritizes aspects of religious branding and justice for every congregation. With increasing attention to the rights of people with disabilities in terms of religious tourism, the image and branding offered will increase to attract the wider community to increasingly visit tourism in Madura in general and religious tourism in Sumenep in particular. Development that focuses more on the tourism sector and the creative economy, in fact, should not marginalize people with disabilities as part of the development object itself. Therefore, inclusion-friendly tourism development needs to be an input for related agencies and local governments to better uphold aspects of social justice among fellow humans.

Keywords: Religious tourism, Inclusion development, Madura

Abstrak

Dalam melakukan pembangunan yang berkesinambungan, perlu kiranya memperhatikan banyak aspek. Aspek keadilan untuk seluruh masyarakat menjadi salah satu ciri khas branding wisata religi yang mampu memberikan akses kepada masyarakat seluruhnya untuk merasa nyaman, aman dalam berwisata dan menciptakan pertumbuhan ekonomi kreatif masyarakat sekitar yang signifikan. Madura secara umum dikenal sebagai kawasan religius yang menegengahkan nilai-nilai agamis. Dalam nilai-nilai agamis, Tuhan senantiasa tidak pernah membedakan kaumnya. Dalam perkembangannya, wisata religius Madura selayaknya tidak hanya memperhatikan aspek ekonomis, namun memperhatikan keterlibatan keadilan sosial dalam memberikan kesempatan untuk masyarakat disabilitas untuk ikut mengakses fasilitas religi dan pariwisata religi yang dimiliki. Bersama dinas pariwisata, peneliti mencoba untuk memberikan saran dan strategi untuk keberlangsungan pembangunan pariwisata religi yang mengedepankan aspek branding religi dan keadilan terhadap setiap umat. Dengan semakin diperhatikannya hak-hak masyarakat disabilitas dalam hal pariwisata religi, maka semakin akan menambah citra dan branding yang ditawarkan untuk memikat masyarakat luas agar semakin mendatangi wisata-wisata yang ada di Madura secara

umumnya dan wisata-wisata religi di Sumenep secara khususnya. Pembangunan yang lebih menitikberatkan pada sektor pariwisata dan ekonomi kreatif, senyatanya tidak boleh meminggirkan kaum disabilitas sebagai bagian dari objek pembangunan itu sendiri. Oleh sebab itu, Pembangunan pariwisata yang ramah inklusi perlu menjadi sebuah masukan terhadap dinas terkait, dan pemerintah daerah untuk lebih menjunjung tinggi aspek keadilan sosial diantara sesama manusia.

Kata kunci: Wisata Religi, Pembangunan Sadar Inklusi, Madura

Pendahuluan

Perencanaan dan pengembangan pariwisata tidak terlepas dari empat aspek karakteristik utama pembentuk daya tarik wisata, baik berupa atraksi, amenities, akses, maupun *ancillary*. Dari keempat aspek karakteristik itu, saling mendukung dan saling melengkapi antara satu dengan yang lainnya. Ketersediaan dan kelayakan dari masing masing aspek pembentuk pariwisata dapat berimplikasi terhadap kualitas pariwisata dan target wisatawan yang diharapkan datang berkunjung. Wisatawan yang merupakan sasaran dalam peningkatan pariwisata, harus terfasilitasi dengan baik dengan mempertimbangkan tidak hanya kesenangan, namun juga keamanan dan edukasi yang bisa diberikan salah satu tempat wisata. Destinasi wisata yang memiliki atraksi unik dan beragam mampu menarik perhatian calon wisatawan. Oleh sebab itu, perlu adanya kreatifitas yang selalu dibangun mengikuti perkembangan masyarakat yang dinamis. Misalnya, keindahan alam, warisan budaya, peristiwa budaya, dan kegiatan rekreasi yang menarik dapat menjadi atraksi utama suatu daerah, sehingga meninggalkan kesan yang membuat senang dan nyaman dan tidak terkesan membosankan [1].

Bryant and White dalam Suyono [2] menyebutkan bahwa pembangunan adalah upaya meningkatkan kemampuan manusia untuk mempengaruhi masa depannya dengan memiliki lima implikasi utama, yaitu: (1) Pembangunan berarti membangkitkan kemampuan manusia secara optimal, baik individu maupun kelompok atau bisa juga disebut komunitas (*capacity*). (2) Pembangunan berarti mendorong tumbuhnya kebersamaan, pemerataan nilai dan kesejahteraan (*equity*). (3) Pembangunan berarti menaruh kepercayaan kepada masyarakat untuk membangun dirinya sendiri sesuai dengan kemampuannya. Kepercayaan ini dinyatakan dalam bentuk kesempatan yang sama, kebebasan memilih dan kekuasaan untuk memutuskan (*empowerment*). (4) Pembangunan berarti membangkitkan kemampuan untuk membangun secara mandiri (*sustainability*). (5) Pembangunan berarti mengurangi ketergantungan negara satu kepada negara lain, menciptakan hubungan yang saling menguntungkan dan saling menghormati

(*interdependence*). Lima prinsip dasar pembangunan di atas harus berorientasi pada pembangunan yang berwawasan *people centered development* (pembangunan yang berpusat pada rakyat), yang berarti adanya proses pembangunan dengan tujuan peningkatan kemampuan manusia dalam menentukan masa depannya [2]. Pariwisata ialah suatu proses perjalanan dari satu tempat ke tempat lain yang bersifat sementara dan di luar tempat tinggalnya, baik perorangan maupun kelompok.

Pariwisata diadakan karena berbagai kepentingan seperti kepentingan budaya, sosial, agama atau kepentingan yang lainnya dengan tujuan untuk memperoleh kenikmatan, serta memenuhi hasrat ingin mengetahui sesuatu. Dalam kehidupan bermasyarakat, pariwisata amatlah dibutuhkan untuk merefresh kembali pikiran yang penat, capek untuk kembali semangat dalam menempuh kehidupan. Sebagian masyarakat ada yang berpendapat bahwa berwisata hanya akan menghambur-hamburkan uang, namun di sisi lain ada pendapat yang menyatakan bahwa pariwisata tidak hanya menghambur-hamburkan uang namun untuk memberikan pelayanan terhadap badan kita agar bisa fresh kembali. Selain itu, pariwisata juga dapat dilakukan bersamaan dengan tugas-tugas yang rutin. Rentang waktu yang diperlukan dalam berwisata adalah bermacam-macam. Orang atau kelompok yang mengadakan perjalanan disebut wisatawan jika lama tinggalnya sekurang-kurangnya 24 jam di daerah atau tujuan wisata tetapi jika lama tinggalnya dalam waktu kurang dari 24 jam disebut pelancong [3].

Menurut Undang–Undang No. 10 Tahun 2009 [4] Tentang Kepariwisata, wisata ialah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara. Sedangkan pariwisata ialah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah dan pemerintah daerah. Pemerintah dan Pemerintah Daerah mempunyai kewajiban di dalam pembangunan kepariwisataan sesuai dengan isi Undang–Undang No. 10 Tahun 2009 [4]. Pariwisata memberikan efek yang positif tidak hanya dari pihak wisatawan, namun juga dari pihak pemilik tempat wisata karena dapat mendatangkan penghasilan yang secara signifikan. Peningkatan pendapat inilah yang terus digaungkan oleh dinas pariwisata agar pariwisata di Indonesia terus bertumbuh secara umum, dan di Sumenep secara lebih khusus. Adapun manfaat yang lebih rinci mengenai pariwisata, adalah seperti berikut: (a) Menyediakan informasi kepariwisataan, perlindungan hukum, serta keamanan

dan keselamatan kepada wisatawan; (b) Menciptakan iklim yang kondusif untuk perkembangan usaha pariwisata yang meliputi terbukanya kesempatan yang sama dalam berusaha, memfasilitasi dan memberikan kepastian hukum; (c) Memelihara, mengembangkan dan melestarikan aset nasional yang menjadi daya tarik wisata dan aset potensial yang belum tergali; dan (d) Mengawasi dan mengendalikan kegiatan kepariwisataan dalam rangka mencegah dan menanggulangi berbagai dampak negatif bagi masyarakat luas.

Sejalan dengan visi misi Pariwisata Indonesia dan Tujuan pembangunan Pariwisata sesuai Undang-undang Nomer 25 tahun 2000 [5] timbul paradigma baru yaitu pengembangan pariwisata dengan pola *“Integration”* yaitu pengembangan pariwisata dimana wisatawan hidup secara bersama-sama dengan masyarakat/penduduk lokal. Masyarakat lokal atau komunitas menjadi ujung tombak dalam sebuah pengembangan pariwisata, karena yang paling mengerti kondisi yang ada di lingkungan tersebut dan kemampuan yang dimiliki anggota komunitas dan pemerintah setempat. Pengembangan pola pariwisata ini dikenal dengan nama *“Community Base Tourism”* (Pariwisata berbasis Masyarakat) yaitu pengembangan pariwisata dikembangkan dimana seluruh aktivitas wisatawan berlangsung dan berbau dengan kelompok komunitas tertentu secara spesifik. Nilai tambah yang diperoleh dari pengembangan Pariwisata yang berbasis komunitas adalah (1) komunitas masyarakat dapat berperan sebagai pelaku, mereka dapat menyediakan tempat tinggal bagi wisatawan, penyediaan makanan dan minuman, jasa laundry, jasa usaha angkutan, dan jasa-jasa lainnya. (2) meningkatnya konsumsi produk lokal (sayuran, buahbuahan, seni kerajinan, makanan khas, dan lain-lain, kerja sehingga akan mendorong kelangsungan usaha yang berbasis tradisi dan kelokalan. (3) mendorong pemberdayaan tenaga kerja setempat dengan program cipta kerja dan ekonomi kreatif, misalnya sebagai penyedia atraksi seni budaya, kerajinan dan lain-lain). (4) meningkatkan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai tradisi serta sifat dan kemampuan komunitas dan budaya lokal serta keunikan lingkungan alam yang dimiliki.

Pariwisata juga bisa menjadi hak bagi setiap individu, maka dengan memastikan ketersediaan, kecukupan dan peningkatan kualitas di setiap aspek, sebuah destinasi pariwisata memiliki peluang lebih besar untuk berhasil menarik wisatawan dan meningkatkan kontribusi ekonomi dan sosial bagi daerah tersebut. Akan tetapi perkembangan pariwisata di Indonesia belum sepenuhnya adil dan proporsional. Kurangnya kesempatan bagi kelompok masyarakat dengan disabilitas atau yang sering disebut penyandang disabilitas untuk sepenuhnya menikmati

manfaatnya seringkali menjadikan masyarakat disabilitas terpinggirkan dalam mengakses fasilitas pariwisata. John Rawls mengatakan dalam keadilan dengan segala kejujuran dalam berpendapat dan berkeputusan tanpa ada diskriminasi dan ketidak-jujuran (*justice as fairness*) adalah antara lain persamaan kesempatan. Akan tetapi apabila terpaksa harus melakukan politik perbedaan (*discriminating policy*) hanya boleh dilakukan demi keuntungan bagi yang paling kurang beruntung (*for advantage for the least advantage*) [6] . Meskipun menjadi bagian dari golongan kurang beruntung, namun kelompok minoritas ini tetaplah mempunyai hak yang sama seperti warga negara lainnya. Kelompok disabilitas kendati yang di maksud Rawls di sini merupakan masyarakat miskin dan terbelakang, akan tetapi penyandang disabilitas dapat juga masuk kedalamnya, seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 2016. (Pertimbangan Poin B) yang menyatakan bahwa “sebagian besar penyandang disabilitas di Indonesia hidup dalam kondisi rentan, terbelakang, dan/atau miskin disebabkan masih adanya pembatasan, hambatan, kesulitan, dan pengurangan atau penghilangan hak penyandang disabilitas”. Perlunya ada sebuah regulasi dan keserasan penuh dari segala elemen masyarakat untuk bisa mensejajarkan kelompok mayoritas dan minoritas demi persamaan hak dan HAM. Oleh karena itu, untuk mengembangkan sektor pariwisata dengan minat khusus, seperti untuk wisatawan dengan disabilitas, destinasi pariwisata diharapkan dapat memenuhi harapan para wisatawan yang datang, terutama bagi kelompok masyarakat yang mungkin dianggap terpinggirkan dan memiliki kekhasan serta ciri khusus. Ini juga berlaku untuk penyandang disabilitas yang sering kali dilupakan dan perempuan yang biasanya hanya dianggap sebagai pekerja rumahan. Pariwisata harus dikembangkan dengan kesadaran juga secara inklusif.

Pengembangan pariwisata inklusif diartikan sebagai paradigma yang berkembang untuk menghadirkan kesempatan yang sama bagi setiap orang untuk dapat menikmati aktivitas pariwisata baik sebagai “*house*”, yakni masyarakat lokal, maupun “*guest*”, wisatawan dengan kebutuhan tertentu. Hal ini tidak terkecuali untuk para penyandang disabilitas yang selama ini sering terlupakan keberadaannya dan perempuan yang dianggap sebagai pekerja di rumah. Kelompok difabel dan masyarakat marjinal lainnya tergolong salah satu kelompok yang seakan-akan keberadaannya tidak diakui dalam industri pariwisata. Mereka dianggap sebagai kelompok masyarakat yang tidak memerlukan kegiatan berwisata. Ketidak-ramahan industri pariwisata

terhadap penyandang disabilitas tampak pada minimnya ketersediaan informasi, transportasi, akomodasi, atraksi, infrastruktur, dan pelayanan [7,8,9]

Menjadi kota wisata yang sadar akan inklusi adalah penting. Selain menjadikan salah satu tonggak pensejajaran keadilan dalam pengaksesan wisata untuk kaum minoritas seperti kaum disabilitas amatlah dibutuhkan. Menjadi Masyarakat yang memiliki branding yang kuat, harusnya diimbangi dengan adanya pensejajaran posisi antara kelompok minoritas dengan masyarakat pada umumnya. Sayangnya, hal ini belum menjadi focus of interest pemerintah Madura, terutama sumenep. Padahal membangun *city branding* sebagai destinasi wisata membuka kesempatan bagi sumenep untuk bersaing dengan wilayah lain dalam mendapatkan kunjungan wisatawan. Penelitian mengidentifikasi problema pembangunan wisata dalam aspek kesamaan dan keadilan bagi seluruh umat manusia adalah mutlak penting. Sebagaimana kita sebagai masyarakat biasa, masyarakat disabilitas juga memiliki hak yang sama dalam mengunjungi tempat-tempat wisata yang syarat akan kaidah dan nilai religi sebagai *city branding* di Sumenep pada khususnya, dan Madura pada umumnya [10].

PPDS adalah Persatuan penyandang disabilitas Sumenep, yang digawangi oleh beberapa anggota aktif. Dalam pengembangan pariwisata yang berbasis inklusif, perlu melibatkan komunitas dalam pendekatan berbasis *Community Based Tourism* (CBT). Dalam komunitas ini, banyak sekali kebutuhan yang dikembangkan terutama dalam cipta kerja dan ekonomi kreatif, sehingga kelompok minoritas dalam hal ini adalah disabilitas, memiliki kesempatan untuk mendapatkan penghasilan dan berdaya secara ekonomi, dan dampak lebih luasnya adalah meningkatkan pembangunan pariwisata yang ada di Madura sebagai kota wisata. Pembangunan tanpa pariwisata, maka tidak akan sempurna karena kedua konsep ini saling melengkapi satu dengan yang lain. Begitupula pembangunan tanpa menghadirkan inklusifitas akan menjadi pembangunan yang tidak seimbang. Paradigma tentang persamaan dalam hal pembangunan harus dikedepankan, karena meskipun mereka adalah kelompok minoritas, namun mereka bisa melakukan banyak hal, jika diwadahi dan diberikan akses dan ruang.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Penggunaan metode ini bertujuan untuk mengembangkan pengertian tentang individu dan berbagai kejadian dengan

memperhitungkan konteks yang relevan, dan bertujuan memahami fenomena sosial melalui gambaran holistik dan memperbanyak pemahaman mendalam.

Pemilihan Lokasi Penelitian

Penentuan lokasi penelitian adalah hal yang sangat krusial dalam penelitian kualitatif [15]. Dibutuhkan ketelitian khusus dalam penentuan lokasi, hal ini dikarenakan lokasi penelitian akan sangat mempengaruhi hasil dari penelitian itu sendiri. Lokasi penelitian sedapat mungkin adalah lokasi yang dimungkinkan terjadinya pengumpulan data yang relevan dengan tujuan dan pertanyaan penelitian, sehingga berbagai persoalan yang hendak diteliti dapat ditemukan jawabannya [16].

Penelitian ini akan dilaksanakan di Madura yang meliputi yaitu kota Sumenep: melihat bahwa di Sumenep merupakan daerah dengan *branding* religi dalam upaya peningkatan sentra usaha produktif yang memperhatikan kaum disabilitas yang cukup maju namun pembangunan branding pada wisata religi ini perlu dikembangkan lagi, terlebih dengan mengetengahkan kaum minoritas sebagai bagian yang memiliki hak yang sama dalam pembangunan. Tidak membutuhkan modal yang besar untuk ikut memasukkan hak-hak disabilitas dalam pengaksesan branding pariwisata religi di Sumenep, namun membutuhkan kesepakatan dan pembangunan yang signifikan dari tahun ke tahun.

Teknik Penentuan Informan

Penelitian ini menggunakan konsep yang diajukan oleh Koentjaraningrat mengenai informan. Bagi [17], informan adalah individu sasaran wawancara untuk mendapatkan keterangan dan data dari individu tersebut untuk keperluan informasi. Pendapat Koentjaraningrat memiliki persamaan dengan pendapat Crapo, yang menjelaskan informan adalah orang yang mampu memberikan informasi mengenai kebudayaan mereka atau informasi di luar diri mereka, sedangkan [18] berpendapat bahwa seorang informan adalah orang berbicara dengan dialeknya sendiri, seorang *native speaker*.

Informan yang dipilih dalam penelitian ini adalah para pengelola dan anggota PPDS di sumenep, serta masyarakat Sumenep terutama yang memiliki keluarga penyandang disabilitas. Peneliti juga meneliti informasi di Dinas Sosial yang menangani disabilitas di Kota Sumenep.

Teknik Pengumpulan Data

1. Data Primer

Data primer didapatkan dengan melakukan wawancara mendalam dan observasi partisipasi. Peneliti menyesuaikan waktu luang para informan untuk mendapatkan segala macam data yang diperlukan. Agar lebih efektif wawancara mendalam dilakukan di dalam wisata religi saat waktu istirahat atau di rumah informan dengan menggunakan alat perekam, dan kemudian peneliti mencatatnya dalam buku notes. Pertanyaan yang diajukan sesuai dengan pedoman wawancara yang telah disiapkan sebelumnya. Data yang sudah direkam nantinya akan ditranskrip dan dilakukan reduksi data. Kemudian barulah data disusun dan dianalisis dengan analisis sosiologi

2. Data Sekunder

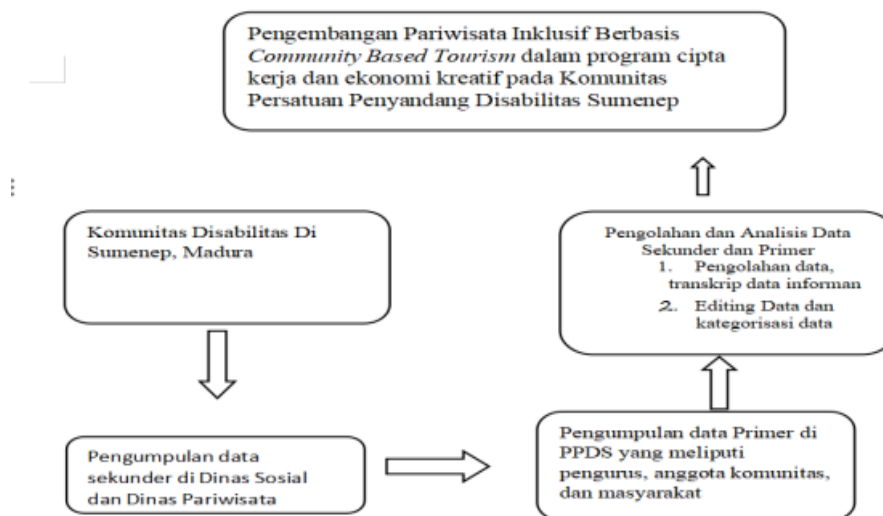
Data sekunder yang dipergunakan dalam penelitian ini tidak lain adalah berbagai informasi mengenai demografi penduduk di kecamatan kota sumenep yang menjadi lokasi penelitian. Peneliti mencari berbagai data monografi kecamatan dengan rentang tahun yang cukup panjang sehingga peneliti dapat melihat adanya dinamika kependudukan maupun dinamika okupasi lahan yang ada kecamatan sumenep tersebut. Berbagai data ini dimaksudkan sebagai penguat dari argumentasi yang dimunculkan dalam penelitian ini [19]. Selain itu peneliti pun akan menelaah ulang berbagai topik yang di bahas di dinas terkait kendala tentang masalah dan kendala yang dihadapi serta upaya untuk penyelesaiannya

Teknik Analisa Data

Teknik analisa data dilakukan dengan melakukan abstraksi berbagai data yang terkumpul berdasarkan kategori-kategori. Data yang ada kemudian dimasukkan dalam kelompok-kelompok tertentu untuk melihat adanya gambaran yang lebih luas dari berbagai potongan data yang telah didapatkan. Mengingat penelitian ini bukan lah penelitian survei, maka penelitian ini menjadi sangat bergantung pada kemampuan wawancara, kejelian observasi, dan interpretasi peneliti. Sebagai bagian dari instrumen penelitian, peneliti sedapat mungkin akan menjaga objektivitas sehingga data yang dimunculkan tidak bias.

Analisis data penelitian ini berkaitan langsung dengan data yang peneliti dapatkan. Dengan demikian seluruh analisis harus berdasarkan pada data yang tersedia bukan pada berbagai ide yang telah ditetapkan oleh peneliti sebelumnya. Konsekuensinya adalah, hasil yang diperoleh sewaktu-

waktu dapat berubah sesuai dengan entri data terbaru. Berbagai data yang masuk, baik dari observasi dan wawancara disusun dalam kategori-kategori tertentu, dan dipecah dalam sub-kategori yang mengacu pada pokok-pokok penelitian yang telah ditetapkan. Pembagian dalam kategori ini bertujuan untuk memudahkan peneliti dalam melihat, memahami dan menginterpretasi data. Dalam melakukan analisis, peneliti melakukan interpretasi. Pemberian makna terhadap fenomena sosial yang ada melalui keterkaitan antara berbagai fenomena, dan melihat data yang di dapat sesuai dengan konteks aslinya.



Dalam peta jalan yang peneliti dan team buat, untuk melihat alur dan cara berpikir yang konkrit dan sistematis demi mendukung kemudahan dalam penelitian.

Hasil dan Pembahasan

Dalam penelitian ini, hasil yang telah kami dapatkan adalah tentang “Pengembangan Pariwisata Inklusif Berbasis *Community Based Tourism* dalam program cipta kerja dan ekonomi kreatif pada Komunitas Persatuan Penyandang Disabilitas Sumenep”

PPDS (Persatuan Penyandang Disabilitas Sumenep).

PPDS adalah merupakan suatu komunitas yang menangani disabilitas yang ada di kabupaten Sumenep. Komunitas ini berperan aktif dalam pemberdayaan teman-teman disabilitas di Sumenep. PPDS sendiri merupakan komunitas yang diketuai oleh Seorang Penggiat Disabilitas

dan merupakan seorang disabilitas pula. Anggota komunitas ini adalah 1.200 an menjangkau seluruh wilayah sumenep dan pulau-pulau kecil di sekitar Sumenep. Berikut ini data yang didapatkan dari keterangan ketua PPDS Sumenep, Pak Sholeh.

“ Saya dan istri melakukan kegiatan ini semata-mata untuk keberdayaan teman-teman disabilitas. Karena kalau bukan kita, ya siapa lagi. Teman-teman ini membutuhkan komunitas agar bisa mendapatkan pelatihan dan terserap di dunia pekerjaan. “ (Sumber: Data Primer)

Dalam komunitas memang menjadi sebuah ujung tombak dalam pemberdayaan masyarakat dengan disabilitas. Karena perasaan senasib dengan teman-teman disabilitas, pak sholeh merasa bahwa banyak hambatan-hambatan yang perlu diurai dalam mengurangi masalah yang terjadi pada disabilitas, terlebih lagi untuk pengembangan cipta kerja dan ekonomi kreatif yang mendukung branding wisata kabupaten Sumenep. PPDS Menginginkan Perubahan dan Kesetaraan antara Masyarakat Disabilitas dan Masyarakat Umum dalam pembangunan inklusi sesuai undang undang dan menjadikan disabilitas berdaya.

Progress CBT oleh PPDS

Sudah adanya Penanganan terhadap Disabilitas yang terus mendapatkan perhatian di Kabupaten Sumenep, dan melibatkan Komunitas PPDS, namun masih dalam proses karena masih banyak terkendala dari mentalitas disabilitas, dan belum teridentifikasi secara penuh disabilitas yang ada di Sumenep. PPDS melakukan kegiatan penyuluhan kepada disabilitas kabupaten Sumenep, setiap sebulan sekali namun terkendala jarak, untuk pulau-pulau kecil, mentalitas yang tidak ingin maju, serta cenderung menyembunyikan keluarga nya yang disabilitas karena dianggap sebuah aib. Pada Masyarakat yang di pusat Sumenep, cenderung memberikan peluang bagi disabilitas untuk mendapatkan banyak empati dan simpati dari orang lain dengan cara mengemis, bukan dengan aktualisasi diri. Berikut ini pernyataan dari hasil wawancara dengan Pak Sholeh.

“Mentalitas itu terutama harus kami bangun dengan serius. Mentalitas di Madura dengan di Jawa itu berbeda bu, kalau di Madura ketika memiliki keluarga yang disabilitas, maka akan disembunyikan dan dianggap sebagai aib. Sehingga menyusahkan kami untuk melakukan sosialisasi dan pendampingan. Namun di sisi lain, di tempat yang lebih masuk di perkotaan Sumenep, malah memiliki keluarga yang memiliki kekurangan malah dijadikan sebagai tulang punggung dengan mengemis” (Sumber: Data Primer)

Dari keterangan pak Sholeh diatas mengisyaratkan bahwa ada 2 tipe masyarakat yang ada di Sumenep. Yaitu masyarakat yang menganggap keluarga disabilitas itu adalah sebuah aib, namun

ada pula yang menjadikan keluarga yang disabilitas tersebut menjadi tulang punggung dengan cara mengemis. Mengemis merupakan hal yang dianggap lumrah di Madura. Pandangan negatif terhadap pengemis yang dianggap orang yang tidak berguna, orang miskin, orang yang rentan dan terpinggirkan, senyatanya memberikan dampak lain di tempat yang lebih mengenal ekonomi, contohnya di daerah pusat kota Sumenep.

Peneliti melihat ada 2 tipe keluarga pada disabilitas: tipe yang pertama adalah disabilitas masih dipandang sebagai aib yang harus ditutupi sehingga akses pelatihan dan penyuluhan terhambat. Dan pada tipe yang pertama ini lebih berasal dari pinggiran sumenep, pulau-pulau kecil di Sumenep. Dari kedua tipe tersebut, sudah mulai mengalami perkembangan yang signifikan, dibandingkan dengan awal mula PPDS berdiri. Berikut ini penuturan dari Pak Sholeh.

“ Kalau mentalitas ini sulit sekali dirubah, apalagi kalau mereka yang menutup diri, sehingga takut ketahuan dan menganggap aib dan kutukan. Bagaimana selayaknya mengajarkan mere arti pentingnya membangun mentalitas ini yang terus kami lakukan. Minimal sebulan sekali kami memotivasi dan mengadakan pertemuan, serta aktif menjajaki daerah2 kecil di pulau-pulau sekitar Sumenep yang jaraknya jauh.” (Sumber: Data Primer)

Menurut keterangan Pak Sholeh, masalah urgen yang perlu diperbaiki adalah *mental block*, mentalitas yang menjadikan masyarakat dengan disabilitas tidak bisa mendapatkan pelatihan dan sosialisasi serta terhambat dalam terserap di lapangan pekerjaan sesuai dengan peraturan per undang-undangan. Jika dibedakan dengan daerah yang sudah maju, bahwa stigma, mentalitas penghambat untuk disabilitas ini tidak sebesar di daerah Madura, khususnya di Sumenep. Pada daerah yang sudah mendekati perkotaan Sumenep, keluarga dengan disabilitas cenderung salah dalam mengartikan mentalitas yang benar. Kehadiran PPDS yang bersinergi dengan dinas sosial dan pariwisata terus menerus melakukan motivasi, sosialisai, dan pelatihan secara berkala.

Penanganan-penanganan terhadap disabilitas agar terserap di dunia pekerjaan sudah dilakukan dengan memberikan penyuluhan, kursus ketrampilan seperti menjahit, mengemudi, menyulam, membuat produk olahan UMKM yang bisa dipasarkan oleh PPDS dengan dukungan dinas pariwisata dan dinas sosial.

Perlu ditingkatkan lagi pembangunan sadar inklusi, sebagai upaya persamaan hak kaum difabel dan *city branding* pariwisata Sumenep demi peningkatan ekonomi kreatif secara berkala. Untuk daerah-daerah yang sudah maju, menuntut adanya egaliti dan persamaan hak antara kelompok minoritas dengan menunjukkan bakat yang mereka bisa miliki.

Proses Perkembangan pembangunan inklusi di Sumenep.

Masyarakat Sumenep sangat memperhatikan hak-hak kaum minoritas dalam hal ini adalah disabilitas, namun pembangunannya masih belum maksimal. Perlu adanya identifikasi lebih lanjut tentang teman-teman disabilitas. Hanya Wisata-wisata besar saja yang dijadikan sarana untuk prioritas hak hak disabilitas. Berikut ini, penuturan dari Dinas Pariwisata yang bersinergi dengan komunitas dalam penanganan disabilitas.

“Kalau di Sumenep itu, memang sudah terbentuk pembangunan inklusi, namun agak susah juga prosesnya, karena kita perlu melihat dan mengidentifikasi lebih lanjut tentang jenis disabilitas nya, sehingga, kami dari dinas memudahkan dalam memberikan link pekerjaan. “ (Sumber: Data Primer)

Dari penyajian data diatas, Dinas sosial mencoba untuk memberikan penjelasan bahwa dinas sosial dan dinas pariwisata sudah mencoba untuk bersinergi dengan komunitas disabilitas untuk membantu mengatasi masalah teman-teman disabilitas, namun hal tersebut kurang maksimal karena perlu adanya identifikasi lebih lanjut tentang jenis disabilitas, sehingga bisa diarahkan dimanakah dalam sektor usaha. Identifikasi juga bisa melihat pada tempat pekerjaan yang cocok dan model usaha yang sesuai, sehingga tidak bisa di samakan dengan rata, sebab mereka memiliki karakteristik sendiri-sendiri dan kemampuan sendiri-sendiri.

Kesimpulan

Ada 2 tipe keluarga disabilitas di Sumenep yaitu yang pertama adalah yang malu terhadap keberadaan anggota keluarganya yang disabilitas dan dianggap aib, dan yang kedua adalah mempekerjakan anggota keluarganya yang menjadi penyandang disabilitas sebagai tulang punggung keluarga. Penyuluhan dan program pendampingan PPDS sudah dilakukan sebulan sekali namun terkenda: jarak, mentalilitas disabilitas dan keluarga. Sudah mulai banyak perubahan terjadi jika dibandingkan dengan awalmula PPDS berdiri. PPDS menggandeng Dinas sosial masih belum mengidentifikasi secara utuh jenis2 disabilitas dan level disabilitas, sehingga kesulitan dalam penyaluran ke beberapa tempat kerja sesuai dengan UU.

Daftar Pustaka

1. Millenia, J., Sulivinio, S., Rahmanita, M., & Osman, I. (2021). Strategi Pengembangan Wisata Mangrove Desa Sedari Berbasis Analisis 4a (Attraction, Accessibility, Amenities, Ancillary Services). *Jurnal Ilmiah Pariwisata*, Vol. 26, No. 3, 284-293.
2. Suryono, Agus. 2010. *Dimensi-Dimensi Prima Teori Pembangunan*. Malang: Ub Press.
3. Suwanto, Gamal. 1997. *Dasar-Dasar Pariwisata*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata.
5. Undang-Undang Nomer 25 Tahun 2000 Tentang Pembangunan Nasional
6. Rawls, J. (1971). *A Theory Of Justice: Original Edition*. Harvard: Harvard University Press.
7. Das, S., & Rudra, R. (2015). Tourism Accessibility For Disabled Travelers: An Optimistic Concept On Tourism Industry In Bangladesh. *International Journal Of Advancements In Research & Technology*, 4(10), 37-48
8. Michopolou, E., Darcy, S., Ambrose, I., & Buhalis, D. (2015). Accessible Tourism Futures: The World We Dream To Live In And The Opportunities We Hope To Have. *Journal Of Tourism Futures*, Vol. 1, No. 3, 179-188.
9. Darcy, S., & Dickson, T. J. (2009). A Whole-Of-Life Approach To Tourism: The Case For Accessible Tourism Experiences. *Journal Of Hospitality And Tourism Management*, 16, 32-44.
10. Prastiwi, M.I, Wardana, I.J.K (2023). Penelitian: Pengembangan Wisata Religi Sadar Inklusi (Strategi Pengembangan Wisata Religi Yang Sadar Pada Kelompok Minoritas Di Sumenep Madura)
11. Prastiwi, M.I (2022). Disertasi. Cyberbullying Remaja Disabilitas (Mekanisme Adaptasi Korban Dalam Modernitas Cair).
12. Prastiwi, M.I, Suyanto, Bagong, Izzati, W.I (2022). Jurnal Masyarakat Budaya Dan Politik: The Liquid Identity Of Adolescents With Disabilities: Changes In The Identity Of Adolescents With Disabilities In Social Media.
13. Turkle, S. (1995) *Life On The Screen: Identity In The Age Of The Internet*. Simon & Schuster, New York.
14. Prastiwi, M.I, Wardana, I.J.K (2024). Journal Of Contemporary Sociological Issues: Of Inclusion Through Minority-Conscious Tourism *In The Madura Religious Tourism Area*
15. Bryman, A. (2004). Qualitative Research On Leadership: A Critical But Appreciative Review. *The Leadership Quarterly*, 15(6), 729–769
16. Neuman, W.L. (2000) *Social Research Methods Qualitative And Quantitative Approaches*. 4th Edition, Allyn & Bacon, Needham Heights.
17. Koentjaraningrat (1990). *Kebudayaan, Mentalitas, Dan Pembangunan*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama
18. Crapo, R. H. (2002). *Cultural Anthropology : Understanding Ourselves & Others* (5th. Ed). Semarang: Mcgraw-Hill Companies